

SPOTLIGHT ON

Providing adequate food, clothing and shelter for individuals and their families is one of the basic requirements in any society. Apart from the subsistence economy, to a large extent this is dependent upon people's capacity to locate some form of income-generating employment. One very real and dangerous impact of the Indonesian economic crisis - at least in those parts of the country where its impact has been most severe - has been the upheaval within the labour market as so many large companies and business enterprises have collapsed or been forced to reduce drastically their activities. As a result, we all know that many people have lost their jobs, especially in urban areas. But just how extensive have these changes been? Which industries have been most affected, and what alternative forms of employment have those who have lost their jobs been able to find? What has been the impact on families and the wider community? SMERU has been working in recent months to shed some light on these complex problems.

In this issue of our newsletter we present in summary form the results of our investigations. Our field researchers have conducted a large number of interviews with workers who have lost their jobs in the formal sector of the economy as part of four case studies of industries that have been seriously affected by the crisis. We include here the key findings from that study.

Although the crisis has hit hardest in urban areas of Indonesia, we also know that the whole of Java has been affected since there is a powerful interconnection between

events in the main cities and towns and life in the surrounding rural hinterland. A specially commissioned SMERU social impact survey of one such location - along the north coast of West Java - sheds valuable light on occupational changes and the economic impact of these events.

As a complement to both of these studies we include a brief summary of some of the most salient findings to emerge from the most recent labor force survey conducted by the Central Agency for Statistics.

We hope to include further material on the labor force dimensions to the crisis in our next issue. ■ JM

Pengadaan pangan, sandang, dan papan yang cukup bagi seseorang dan keluarganya adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat di manapun berada. Selain masyarakat yang hidup dengan mengandalkan alam untuk menyambung hidup, pengadaan pangan, sandang dan papan ini sangat bergantung kepada kapasitas masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Satu dampak yang sangat nyata dan berbahaya dari krisis yang sedang melanda Indonesia - paling tidak di wilayah yang paling parah terkena - adalah kekacauan pasar tenaga kerja, dimana banyak perusahaan dan usaha yang ambruk atau terpaksa mengurangi kegiatannya secara drastis. Sebagai akibatnya, kita semua mengetahui banyak orang telah kehilangan pekerjaan terutama di wilayah perkotaan. Tetapi seberapa besar perubahan yang terjadi? Industri manakah yang diterpa paling parah, dan alternatif pekerjaan apakah yang dapat dimasuki oleh mereka yang telah kehilangan pekerjaannya? Apa pengaruhnya terhadap keluarga dan masyarakat luas? Beberapa bulan terakhir SMERU telah bekerja untuk memberikan beberapa gambaran seputar masalah yang kompleks ini.

Pada edisi Newsletter kali ini kami tampilkan hasil investigasi dalam bentuk ringkasan. Tim peneliti kami telah melakukan wawancara dengan banyak pekerja yang telah kehilangan pekerjaannya, pada studi kasus di empat industri yang parah terkena dampak krisis. Kami juga memasukkan temuan utamanya.

Meskipun daerah perkotaan di Indonesia merupakan daerah terparah yang terkena dampak krisis, kita juga mengetahui bahwa seluruh wilayah di Jawa juga terkena dampak ini, karena adanya hubungan antara peristiwa di kota besar dan kota kecil dengan kehidupan di perdesaan sekitarnya. Survei khusus yang dipesan SMERU seputar dampak sosial di suatu lokasi - sepanjang pantai utara Jawa Barat - memberikan gambaran yang sangat berarti tentang perubahan pekerjaan dan dampak ekonomi dengan adanya kejadian tersebut.

Sebagai pelengkap kedua studi ini, kami juga menampilkan ulasan singkat dari beberapa penemuan penting yang berasal dari survei tenaga kerja terbaru yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik.

Kami berharap dapat menyampaikan berita lain tentang aspek ketenagakerjaan semasa krisis pada edisi mendatang. ■ JM

Pusat Informasi - Jaring Pengaman Sosial (PI-JPS) Social Safety Net - Information Clearing House

As part of the effort to increase transparency by providing access to data and information about the various SSN programs, the government of Indonesia has recently established SSN information clearing houses at the national, provincial and kabupaten or kotamadya levels.

The SSN National Information Clearing House (NCH-SSN), which has been operating since May this year, is located in Jakarta at Jl. Cicurug No.1, Jakarta 10310, telephone (021) 390 9740 or 391 4067, fax (021) 390 9740, e-mail: pin-jps@rad.net.id, under the direction of Ir. Erman A. Rahman as Coordinator.

Information centers for every region will soon also be available in each of the 27 provinces and 316 kabupaten and kotamadya in Indonesia at the office of the Regional Planning Board (Bappeda) at the Tk I and Tk II level. The exact addresses of these local centers can be obtained from the National Information Clearing House.

The material to be made available at these clearing houses include the following: general information about SSN programs (manuals, program implementation guidelines, information brochures and leaflets); budget allocations on each program down to the lowest level; periodic reports on the progress of the implementation of each program; reports on problems occurring during implementation (including reports about action taken to address these); the role that is to be given to NGOs throughout the course of each program; the names of contact persons at the implementing agencies for each program; and files of mass media clippings about the SSN program. The above information is to cover all SSN programs for the 1998-1999 and is planned to be available for the 1999-2000 fiscal years.

In addition to visiting the SSN information centers, the available data and information can also be accessed via telephone, facsimile, letter, e-mail or by contacting the PIN-JPS website (<http://pin-jps.bappenas.go.id>).

It is hoped that the existence of the SSN information clearing houses at the kabupaten level, in addition to improving the coordination between Bappeda Tk II and the various SSN program implementing agencies, will also enhance collaboration between local government, non-government agencies and the wider community in the planning, implementation and monitoring of the various SSN programs.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan transparansi melalui penyediaan akses terhadap data dan informasi berbagai program Jaring Pengaman Sosial kepada masyarakat, maka pemerintah Indonesia telah menyediakan pusat informasi JPS pada tingkat nasional, propinsi and kabupaten atau kotamadya.

Pusat Informasi – Jaring Pengaman Sosial (PI-JPS) yang telah beroperasi sejak bulan Mei tahun ini berlokasi di Jakarta dengan alamat Jl. Cicurug No. 1, Jakarta 10310, telepon (021) 390 9740 atau 391 4067, faksimili: (021) 390 9740, e-mail: pin-jps@rad.net.id, dengan Ir. Erman A. Rahman sebagai Koordinator.

Sedangkan pusat informasi untuk masing-masing wilayah dalam waktu dekat akan tersedia di 27 propinsi dan 316 kabupaten atau kotamadya di Indonesia, berada di Kantor Bappeda Tk. I dan Bappeda Tk II. Alamat lengkap pusat informasi dimaksud dapat diperoleh di Pusat Informasi Nasional.

Target informasi yang akan disediakan pusat informasi ini antara lain gambaran umum program-program JPS (Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan Program, brosur, leaflet, dan produk komunikasi lainnya), alokasi dan realisasi masing-masing program sampai tingkat terendah, kemajuan pelaksanaan program secara berkala, masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program (termasuk tindakan yang diambil dalam menangani masalah tersebut), peran serta yang diberikan kepada lembaga non-pemerintah dalam pelaksanaan program, contact person pelaksana di tiap program yang dapat dihubungi, klipping berita media massa tentang pelaksanaan program-program JPS. Informasi tersebut mencakup seluruh program JPS TA 1998/1999 dan direncanakan program TA 1999/2000.

Selain dapat mengunjungi pusat informasi JPS ini, data dan informasi dapat diperoleh melalui telepon, faksimili, surat, e-mail atau dengan menghubungi website PIN-JPS: <http://pin-jps.bappenas.go.id> .

Adanya pusat informasi JPS di tingkat kabupaten, selain meningkatkan koordinasi Bappeda Tk II dengan berbagai instansi pelaksana program JPS, juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerjasama antara pihak pemerintah daerah dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat luas dalam perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan berbagai program JPS.

SMERU Berkunjung ke Kalimantan

SMERU Visits Kalimantan

In an effort to learn more about NGOs in the region and the ways that they have been responding to the crisis, and in particular to find out about the extent of their involvement in the implementation of SSN program and their interest in taking part in the monitoring of these programs in their area, SMERU has recently paid a visit to several NGOs in South and Central Kalimantan.

In South Kalimantan we held discussions with five local NGOs and in Central Kalimantan with a further fourteen local organisations whose activities and interests ranged across various areas, including the environment, community development, natural resources, and local culture. The results of our discussions with NGOs in these two provinces highlight three important issues:

- Most local NGOs still do not understand the SSN program in any significant detail. None have been actively involved so far in SSN monitoring. Their knowledge of these programs up to now has been drawn from whatever general information can be gleaned from the print and electronic mass media.
- Local government and Bappeda officials contacted by SMERU admitted that the relationship between local government and NGOs had in the past been neither very close nor effective. Because of these past poor relations, some Tk II Bappeda officials have found some difficulty following the Bappenas instructions to send copies of the SSN 1998 - 1999 program Information Folder to two local NGOs.
- As to the question of their interest in undertaking SSN monitoring activities, there are three different responses from local NGOs:
 - Those who are extremely interested in participating in monitoring SSN programs. This group of NGOs believe that the SSN programs are essential for the community during the crisis period. Since some of the SSN programs draw on loans that have to be repaid by the entire Indonesian people, these NGOs feel compelled to become watchdogs during the implementation of the SSN program.
 - Those who are generally interested in participating in monitoring activities. These NGOs are broadly in agreement with the first group. Although they expressed the wish that they had been included in the planning

Beberapa waktu lalu, SMERU melakukan kunjungan ke beberapa LSM di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk mengenal lebih dekat keberadaan LSM di wilayah itu, mengetahui upaya LSM dalam mengatasi krisis, dan khususnya untuk mengetahui interaksi LSM dengan pelaksanaan program JPS dan minat LSM untuk melakukan kegiatan pemantauan program JPS di daerah setempat.

Di Kalimantan Selatan, SMERU berdiskusi dengan lima LSM setempat, dan di Kalimantan Tengah dengan empat belas LSM. Selama ini cakupan kegiatan dan perhatian LSM dimaksud beragam antara lain permasalahan lingkungan, pengembangan masyarakat, sumberdaya alam, budaya, dan lain-lain. Hasil diskusi dengan LSM di dua propinsi tersebut mengisyaratkan paling tidak tiga hal penting yaitu:

- Kebanyakan LSM masih belum paham program JPS secara rinci. Sampai sejauh ini tidak ada yang secara aktif memantau JPS. Pemahaman tentang program JPS hanya diperoleh melalui berita-berita umum yang bersumber dari media cetak maupun elektronik yang tersedia;
- Pihak Pemda/Bappeda yang ditemui SMERU mengakui bahwa hubungan antara pihak Pemda dan LSM di masa lalu memang tidak terjalin secara dekat dan efektif. Disebabkan hubungan yang 'kurang baik' di masa lalu ini, beberapa staf Bappeda Tk II menemui kesulitan dalam melaksanakan permintaan Bappenas untuk mengirim 'Folder informasi program JPS' kepada dua LSM setempat.
- Tentang minat dalam melakukan kegiatan pemantauan program JPS, terdapat tiga kelompok LSM yaitu:
 - **Sangat tertarik** untuk turut melaksanakan kegiatan pemantauan program JPS. Kelompok LSM ini berpendapat bahwa program JPS saat ini masih sangat dibutuhkan masyarakat dalam situasi krisis. Mempertimbangkan bahwa dana sebagian program JPS berasal dari hutang yang harus dibayar 'rakyat' Indonesia, maka LSM ini terpenggil untuk menjadi pengawas dalam pelaksanaan program JPS;
 - **Tertarik** untuk turut melaksanakan kegiatan pemantauan program JPS. Kelompok ini mempunyai pendapat selaras dengan kelompok pertama. Namun walaupun LSM dimaksud ingin dilibatkan pada tahap perencanaan dan mengakui terlambat untuk

phase, they acknowledge that it is now too late for that to occur, and are still determined to influence SSN policy in their region, in particular through the implementation of programs at the community level.

- Those who are not interested at all in participating in monitoring SSN programs. This particular group of NGOs are more interested in the activity programs that they are conducting themselves. They also take the view that they should have been involved in the planning of SSN programs from the outset.

As a result of SMERU's discussions several NGOs are now preparing plans to conduct monitoring of particular SSN programs. Following the trip to Kalimantan, SMERU has just returned from visiting NGOs throughout Sulawesi. A report on this visit will appear in the next edition of our Newsletter. ■ **TN, HS**

terlibat, mereka tetap akan berusaha mempengaruhi kebijakan JPS di wilayah setempat, khususnya pelaksanaan di tingkat masyarakat;

- **Tidak tertarik** sama sekali untuk turut melaksanakan kegiatan pemantauan program JPS. Kelompok ini lebih tertarik pada program aksi yang dapat dilaksanakannya sendiri dan berpendapat bahwa semestinya mereka dilibatkan dalam perencanaan program JPS sejak awal.

Berdasarkan hasil diskusi dimaksud, saat ini beberapa LSM sedang menyiapkan rencana untuk melakukan pemantauan pada program JPS tertentu. Setelah kunjungan ke Kalimantan, SMERU baru saja kembali melakukan kunjungan ke beberapa LSM di Sulawesi. Laporan kunjungan terakhir akan ditemui pada edisi mendatang. ■ **TN, HS**

LSM yang sempat berdiskusi dengan SMERU dimaksud adalah Lembaga Bina Potensia, PKBI-KalSel, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPMA), WALHI KalSel, dan Yayasan Dalas Hangit di Kalimantan Selatan, serta Yayasan Sumber Daya Kalimantan, Yayasan Tambuhak Sinta, Yayasan Lembaga Talusung Damar (YLTD), Silva Raya, Bina Mitra Mandiri, Yayasan Mitra Insani, PKBI KalTeng, Mapas, Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Daerah Kalteng (LMMDDKT), Yayasan Agro Ekonomi, Yayasan Nyalun Menteng, Komite Independen Pemantau Pemilu KalTeng, Tim LSM Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia KalTeng, dan Kalimantan Support Group di Kalimantan Tengah.

Aspek Ketenagakerjaan Semasa Krisis Ekonomi

The Labor Force Dimensions of the Economic Crisis

Studi Kasus di Empat Industri
Case Studies of Four Industries

Background

As a direct consequence of the economic crisis over the past two years, demand for labor has decreased dramatically, especially in urban areas. Down-sizing of the workforce, including the retrenchment of large numbers of permanent employees has been one of the strategies adopted by those companies facing serious difficulties as a result of the crisis.

SMERU decided to investigate the plight of those workers who have been retrenched in four industries - automotive, footwear, textile and building and construction. It is widely accepted that the worst impact has been felt in the fourth of these industries.

The focus of this study was the present situation of those blue-collar workers who have lost their jobs, the impact upon their families, and the extent to which there have been further effects upon the communities where they live and in those areas close to factories and construction sites. The overall condition of these industries was also investigated throughout the course of the study to obtain a total picture.

In-depth interviews were conducted with a large number of retrenched workers in areas surrounding the sites of footwear and textile factories in the Jabotabek region and in Bandung. In the case of the automotive industry, efforts were made to locate not only workers living in the Jabotabek region but also those who had returned to their home villages in the Malang and Sleman areas. Casual workers in the construction sector, virtually all of whom had returned to their villages, were located in 13 villages in seven different districts - in Banyumas, Pekalongan, Demak, Kudus, Pati, Wonogiri and Ngawi.

Main Findings

All four industries have felt the impact of the economic crisis and most have undertaken mass retrenchments of workers. According to some industry association estimates 50 per cent of workers in the footwear and non-garment textile industries have been retrenched, while an estimated 75 per cent of construction workers have lost their jobs from high-rise construction sites and real estate developments.

Latar Belakang

Sebagai akibat krisis ekonomi dua tahun terakhir ini, permintaan tenaga kerja menurun secara dramatis, terutama di wilayah perkotaan. Pengurangan tenaga kerja, termasuk PHK sejumlah besar pekerja-tetap menjadi salah satu strategi yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi kesulitan serius akibat krisis.

SMERU memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap eks pekerja yang telah kehilangan pekerjaan di empat industri - yaitu otomotif, persepatuan, tekstil, serta bangunan dan konstruksi. Kita semua setuju bahwa dampak terparah dirasakan oleh industri keempat ini.

Fokus studi adalah kondisi para pekerja tingkat terbawah (buruh) yang kehilangan pekerjaan, dampak yang dialami keluarganya, serta dampak lanjutan terhadap masyarakat di mana mereka tinggal dan di wilayah sekitar pabrik dan area bangunan. Kondisi industri ini secara umum juga akan digali pada investigasi untuk memberikan gambaran secara utuh.

Wawancara mendalam dengan sejumlah eks pekerja dilakukan di daerah sekitar lokasi pabrik sepatu dan tekstil di wilayah Jabotabek dan Bandung. Khusus untuk eks pekerja industri otomotif, selain menemui pekerja di Jabotabek, juga diupayakan menemui pekerja yang telah kembali ke desa di wilayah Malang dan Sleman. Sedangkan untuk pekerja lepas sektor konstruksi yang hampir seluruhnya segera kembali ke desa, ditemui di 13 desa di 7 kabupaten yang berbeda - yaitu: Banyumas, Pekalongan, Demak, Kudus, Pati, Wonogiri, dan Ngawi.

Temuan Utama

Keempat industri yang diamati sangat merasakan dampak krisis serta banyak melakukan PHK massal terhadap para pekerja. Menurut beberapa asosiasi industri, diperkirakan 50 persen pekerja di sektor industri persepatuan dan tekstil (kecuali garmen) telah kehilangan pekerjaan. Sektor konstruksi paling parah terkena dampak krisis; dan sekitar 75 persen pekerja konstruksi diperkirakan telah kehilangan pekerjaan dari bangunan tinggi dan real estat.

What strategies have companies adopted in dealing with the crisis? These strategies have involved a number of stages: the introduction of greater cost efficiencies, efforts to enter export markets, product diversification and reduction of risk-prone activities, and the down-sizing of the workforce. To minimize the amount of severance pay that they have to provide, companies have developed a number of specific policies including the following: the dismissal of trainee workers and daily/contract workers, improvements in work discipline through sanctions in the form of retrenchment without severance pay, the opportunity for workers to resign with compensation or an early pension, temporary lay-offs, and retrenchment with full severance pay.

Wages and Severance Pay: Wage rates are not based on educational level or gender but rather on the type of work, the length of employment, and the worker's position in the company. In the case of casual workers in the construction industry, wages are determined by the level of skill or ability of the individual worker. Almost all automotive, textile and footwear workers received severance pay at the time of retrenchment, whereas on the whole casual construction workers did not.

Have retrenched workers remained in the cities or returned to their home villages? Some footwear and textile workers returned to home villages after losing their jobs, while the rest have remained in the city or around industrial locations in the hope of obtaining another job of the same kind or of moving into the informal sector, or even into the construction industry (as unskilled builder's laborers working on house construction or renovation). Automotive workers have generally remained in the city and set up some kind of business as small-scale private entrepreneurs or else have sought work in the informal sector. Those who returned to their home village usually did not remain there very long. It was only casual construction workers who have almost always returned to their villages immediately after becoming unemployed because, despite working in the city, they have continued to be residents of the village and still have a house and a nuclear family there.

What has been the impact on workers' lives? In general, many workers who have remained in the city have not yet been severely affected because when the SMERU Team visited them many still had access to severance pay. Some have obtained other work, even though it may be in the informal sector (as ojek drivers or builder's laborers), while others have found jobs in industries like garment manufacturing. Nevertheless, even these workers, like those who remain unemployed, have generally reduced their purchases of non-essentials like cosmetics, cigarettes and clothing. Some workers were encountered who have suffered psychological stress because they are now unemployed or because people are aware that they are working in the informal sector (doing repair work or ojek driving). Some are distressed by being at home all the time, some feel the loss of friends to

Strategi apa yang ditempuh oleh perusahaan dalam menghadapi krisis? Strategi ini mencakup beberapa tahapan: dimulai dengan melakukan efisiensi biaya (cost down), mencari peluang pasar ekspor, diversifikasi produk, mengurangi kegiatan yang beresiko, serta melakukan PHK terhadap para pekerja. Pada umumnya perusahaan melakukan berbagai kebijakan untuk meminimalkan besarnya pembayaran uang pesangon, misalnya dengan memberhentikan pekerja yang masih dalam status training atau pekerja harian/kontrak, meningkatkan disiplin kerja dengan sanksi PHK tanpa uang pesangon, penawaran mengundurkan diri dengan kompensasi atau pensiun dipercepat, merumahkan sementara pekerja, sampai PHK dengan pesangon penuh.

Upah dan uang pesangon: Penetapan upah pekerja tidak didasarkan pada tingkat pendidikan dan perbedaan gender, melainkan pada jenis pekerjaan yang dilakukan, masa kerja, dan tingkat jabatan pekerja dalam perusahaan. Khusus mengenai tenaga lepas di sektor konstruksi; upah lebih didasarkan pada tingkat keahlian atau ketrampilan yang dimiliki. Hampir semua pekerja otomotif, tekstil, dan persepataan memperoleh uang pesangon ketika di PHK, sedang pekerja lepas pada sektor konstruksi tidak mengenal uang pesangon. Hanya pekerja tetap sektor konstruksi yang mendapatkan pesangon.

Apakah eks pekerja tetap tinggal di kota atau kembali ke daerah asalnya masing-masing? Beberapa pekerja pada industri sepatu dan tekstil yang kembali ke desa setelah kehilangan pekerjaannya, dan sebagian lainnya tetap bertahan di kota atau di daerah sekitar industri untuk memperoleh pekerjaan lain yang sejenis atau terjun ke sektor informal, atau bahkan ke sektor konstruksi (sebagai kenek/kuli bangunan rumah tinggal atau renovasi). Para eks pekerja industri otomotif pada umumnya tetap bertahan di kota untuk membuka usaha sebagai wiraswasta atau berusaha di sektor informal dan kalau ada yang kembali ke desa umumnya dalam jangka waktu tidak lama. Hanya pekerja lepas di sektor konstruksi yang hampir seluruhnya akan segera kembali ke desa setelah menganggur, daripada terus bekerja di kota, karena sejak semula mereka telah tinggal serta memiliki rumah dan keluarga inti di desa.

Apa dampak terhadap kehidupan pekerja? Dampak terhadap eks pekerja dari industri sepatu dan tekstil yang masih tinggal di kota pada umumnya belum terlalu dirasakan karena sebagian eks pekerja ketika ditemui Tim SMERU masih memiliki uang pesangon, atau telah mendapatkan pekerjaan lain sekalipun di sektor informal (sebagai tukang ojek, kuli bangunan) atau di industri yang lain (garmen). Walaupun demikian pada umumnya para eks pekerja telah mengurangi kebutuhan sekunder, seperti penggunaan alat kosmetika, rokok, pakaian dan sebagainya. Dijumpai kasus dimana pekerja yang masih menganggur mengalami tekanan psikologis, seperti sakit gatal-gatal, malu karena masih menganggur, malu diketahui bekerja di sektor

communicate with, while others are afraid that they will be thought responsible every time there is a theft in the neighbourhood.

Construction workers - the hardest hit: The impact of the crisis has been felt most severely by those casual construction workers who did not receive severance pay at the time when they suddenly lost their jobs. Most immediately returned to home towns and villages without any guarantee of a source of livelihood. The consequences can be seen in the following developments:

- i. many workers' wives have relatively large debts at the warung and a limited capacity to repay; many warung owners have started to impose credit limitations
- ii. some wives are now working in the city or some have gone overseas in search of employment
- iii. there is now a greater number of workers and sharper competition in the agricultural and informal sectors, where wage levels or earnings are lower
- iv. some men have found difficulty obtaining available jobs in the village, because of a lack of capital or the loss of contacts as a result of their frequent absence
- v. there are growing signs of the sale of personal possessions, including animals and household goods such as TV sets and radios merely to survive, and
- vi. some families are forced to delay the payment of house and land tax.

What has been the impact on workers families?

On the whole, this has been quite profound. Many families have reduced their consumption of food, especially in terms of quality and the amount of protein. Nevertheless, they are still trying to provide milk or nutritional food for babies, even though it may involve substitution of cheaper types of food.

The effect on children's education is more difficult to determine. Industrial workers tend to be relatively young and unmarried; if they are married, they normally have only one or two small children (in primary school at the most), which means that expenditure on education is not very high. Nevertheless, some retrenched workers have reported problems with the payment of expenses related to their children's education.

The effect on the health of family members is also difficult to measure. Many of those interviewed are very thankful that they have not been ill, although there is evidence that when people are sick, they are simply buying cheaper non-prescription medicines that are readily available in kiosks. Babies seem to be still being immunized and pregnant women are still visiting the local Community Health Centers for check-ups.

informal (tukang reparasi, ojek), tidak betah di rumah, merasa kehilangan teman untuk berkomunikasi, atau takut disangka berbuat negatif oleh para tetangga bila terjadi kecurian di lingkungan sekitar.

Pekerja bangunan - terparah: Dampak krisis sangat dirasakan oleh para pekerja lepas di sektor konstruksi, karena mereka tidak memperoleh uang pesangon ketika tiba-tiba harus kehilangan pekerjaannya, dan kemudian segera kembali ke desa, tanpa adanya jaminan penghasilan. Dampak ini terlihat antara lain dari:

- i. banyak istri pekerja yang memiliki hutang relatif besar di warung, dengan kemampuan membayar yang kecil; banyak pemilik warung yang mulai memberlakukan pembatasan jumlah pinjaman
- ii. banyak istri pekerja yang sekarang bekerja di kota atau menjadi TKI
- iii. semakin banyak pekerja dan tajamnya persaingan di sektor pertanian dan sektor informal dengan tingkat upah atau penghasilan yang lebih rendah
- iv. sukarnya memasuki lapangan kerja yang tersedia di desa, karena ketiadaan modal atau hilangnya koneksi akibat lamanya mereka tidak bekerja
- v. terdapat tanda-tanda meningkatnya penjualan barang-barang termasuk ternak dan peralatan rumah tangga seperti TV, radio, dll, untuk dapat sekedar menyambung hidup, dan
- vi. penangguhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Apa dampak yang timbul terhadap keluarga pekerja?

Pada umumnya dampak ini cukup terasa. Beberapa keluarga pekerja telah mengurangi konsumsi makan, terutama dari segi kualitas dan tingkat protein yang rendah. Namun pada umumnya mereka tetap mengusahakan kebutuhan susu atau makanan bergizi untuk anak bayinya, meskipun dengan substitusi jenis makanan.

Dampak terhadap pendidikan anak umumnya sukar ditentukan. Eks pekerja yang ditemui umumnya masih relatif muda, masih belum menikah atau yang sudah menikah baru memiliki 1-2 anak yang masih kecil (tingkat SD), sehingga belum banyak membutuhkan biaya pendidikan. Namun demikian, beberapa eks pekerja melaporkan adanya masalah dalam menanggulangi biaya yang berkaitan dengan sekolah.

Dampak terhadap kesehatan anggota keluarga pekerja juga sukar ditentukan. Beberapa eks pekerja yang ditemui merasa bersyukur tidak mengalami sakit serius selama krisis, meskipun terdapat kasus ketika ada yang sakit, hanya memakai obat murah tanpa resep yang banyak tersedia di warung. Anak bayi masih diimunisasi dan ibu-ibu hamil tetap memeriksakan diri ke Puskesmas.

The effects of loss of employment have also been felt by workers' parents, who used to receive regular remittances from their offspring. This has now stopped completely or else the amounts are smaller and less frequent. Where workers have been living with parents, the latter have had once again to provide for these adult children throughout the crisis period. This includes the families of married children who have been forced to return to the parental home in the village because of unemployment. Some parents, aware of the situation, have been able to help by accommodating a son or daughter temporarily separated from their spouse, providing them with capital if they are able, buying food for grandchildren and so on.

Have workers been able to find suitable alternative employment in urban areas? The chances of obtaining a new job in the city are relatively limited because economic activities in almost all sectors have been affected by the crisis. The only exception is the case of automotive workers, many of whom have accumulated sufficient capital to shift to private undertakings or to the informal sector. Male workers who have lost their jobs in the textile and footwear industries are generally more persevering in their attempts to find work, albeit in the informal sector, driven by their sense of responsibility for their family. Unmarried female workers, however, have generally chosen to return to the parental home, while married women have preferred to concentrate on the management of the household and care of their children. These last two groups tend to be more casual about looking for employment. Many only want to work in the same industry in which they were previously employed, because they believe that it will provide them with a more reliable, fixed income (even though that income may be small).

Employment opportunities in agriculture or the informal sector? For workers who have returned to their home village after losing jobs in the city, the scope for employment in the agricultural or informal sectors appears to be very limited. There are a number of reasons for this:

- i. with the exception of construction workers, those affected by the crisis have generally been so long uprooted from the village since finishing school (because the industrial sector required young workers) that the finer points of work in agriculture and in the informal sector are no longer understood
- ii. to find employment in the agricultural sector a worker has to have a network of contacts as well as a strong body; to earn a living in the informal sector requires experience, skills, capital and an entrepreneurial spirit
- iii. farmers prefer agricultural laborers with whom they are familiar and whose ability they know, except in times of great pressure to get work done (and this usually occurs only for very short periods)

Dampak PHK juga sangat dirasakan oleh orang tua pekerja yang biasa menerima kiriman secara kontinu dari anaknya. Kiriman ini kini mandeg sama sekali atau berkurang jumlahnya dengan frekuensi yang tidak tetap. Orang tua dengan anak yang semula tinggal bersama atau belum menikah harus kembali menanggung kebutuhan hidup anaknya, termasuk anak yang telah berkeluarga yang terpaksa kembali ke desa/rumah orang tuanya karena kehilangan pekerjaan. Beberapa orang tua pekerja eks konstruksi maklum dengan keadaan ini dan bersedia membantu anaknya, termasuk menampung kembali anak yang berpisah sementara dengan suami/isteri, menyediakan modal (bila ada), menanggung kebutuhan susu si cucu, dll.

Apakah pekerja mendapatkan peluang untuk menemukan pekerjaan yang cocok di daerah perkotaan? Peluang pekerja untuk memperoleh pekerjaan baru di kota relatif kecil, karena hampir semua sektor kegiatan ekonomi terkena dampak krisis, kecuali untuk eks pekerja otomotif, beberapa dapat beralih ke usaha wiraswasta atau sektor informal karena cukup modal. Pekerja pria berkeluarga yang telah kehilangan pekerjaan di industri tekstil dan persepatuan pada umumnya lebih gigih dalam mencari pekerjaan lain sekalipun di sektor informal, karena adanya rasa tanggung jawab pada rumah tangga. Sedang pekerja wanita yang belum menikah umumnya lebih memilih kembali kepada orang tuanya, dan pekerja wanita yang sudah menikah memilih untuk memfokuskan diri mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Kedua kelompok terakhir ini terlihat lebih santai dalam mencari pekerjaan, dan beberapa hanya menginginkan bekerja pada industri yang selama ini ditekuni atau industri lain yang sejenis karena dianggap dapat memberikan penghasilan tetap dan lebih mapan (sekalipun penghasilannya juga kecil).

Kesempatan kerja di sektor pertanian atau di sektor informal? Bagi pekerja yang telah kembali ke desa asal setelah kehilangan pekerjaannya, peluang memperoleh pekerjaan di sektor pertanian atau di sektor informal di desa sangat kecil. Hal ini disebabkan antara lain:

- i. para pekerja korban dampak krisis pada umumnya telah lama tercabut dari desa sejak selesai sekolah, mengingat sektor industri membutuhkan tenaga kerja yang masih muda, sehingga nuansa pekerjaan di sektor pertanian maupun informal sangat kurang dipahami
- ii. untuk dapat bekerja di sektor pertanian pekerja harus mempunyai jaringan kerja (network), sedang untuk di sektor informal

- iv. many of the workers themselves are reluctant to work in the agricultural and informal sectors either because they now regard such work as demeaning or because they feel that they do not have adequate experience. Only relatively older persons are prepared to work in these two sectors. Where former urban workers seek employment in villages, they generally undertake odd jobs of any sort until they can obtain better work, even though returns to this kind of labor are barely sufficient to enable them to survive.

Apart from workers and their families, who else has been affected? One of the most significant negative impacts has been felt by those communities in the vicinity of factories or industrial areas where mass retrenchments have occurred and also by people living close to building sites where construction work has stopped. Before the crisis, many people in these areas derived their income by supplying a range of services to factory and construction workers. These included the renting of houses or rooms to workers, providing transportation to and from the workplace, operating small food-stalls (*warung*), street vending, and other small business activities that once met the daily needs of workers.

What have been the gender dimensions of these changes? The following key points are worth noting:

- i. the blue-collar workforce in the automotive and construction industries is dominated by men, while the opposite occurs in the footwear and textile industries, where approximately 70 to 80 % of workers are women; they are employed not because men are not attracted to these low-wage industries but because employers find women neater and more careful in their work and are perceived to be more compliant employees
- ii. some women who have lost their jobs in factories now claim that they feel free from the pressure of having to work; these women do not regard themselves to be the main bread-winner in the family and prefer to stay at home with growing children
- iii. even so, there are indications that some women whose husbands have been affected by the crisis and have returned to the village (generally construction workers) have voluntarily taken over the husband's role as the family's main bread-winner by going to the city to look for work or even by becoming domestic workers in other countries under the Indonesian Labor Force scheme. It is clear

harus memiliki pengalaman, keahlian, modal, dan jiwa wiraswasta

- iii. petani pemilik lahan lebih mengutamakan buruh tani yang telah dikenalnya dan yang telah diketahui kemampuannya, kecuali sangat mendesak (yang umumnya hanya dalam jangka waktu yang pendek)
- iv. banyak diantara pekerja sendiri yang enggan bekerja di sektor pertanian dan sektor informal karena pekerjaan itu tidak berarti atau mereka merasa tidak memiliki pengalaman yang memadai. Hanya pekerja berumur yang mau bekerja di kedua sektor tersebut. Kalau ada yang bekerja di desa umumnya hanya bekerja serabutan (bekerja apa saja) dengan tingkat penghasilan yang umumnya jauh lebih kecil yang hanya sekedar untuk dapat menyambung hidup (marjinal) sebelum memperoleh pekerjaan baru yang lebih baik.

Selain pekerja dan keluarganya, siapa lagi yang ikut terkena dampak? Salah satu dampak negatif lain yang cukup berarti dialami oleh masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik atau lingkungan industri yang melakukan PHK massal, atau di sekitar lokasi pembangunan gedung yang terhenti kegiatannya. Sebelum krisis, beberapa anggota masyarakat di wilayah ini memperoleh penghasilan dengan menyediakan berbagai pelayanan kepada pekerja pabrik dan konstruksi. Termasuk diantaranya menyewakan rumah atau kamar kos, menyediakan usaha antar jemput kendaraan dan angkutan umum, usaha warung makanan dan pedagang kakilima, pedagang sayur-mayur keliling, serta usaha-usaha lain yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pekerja.

Aspek 'jender' apa yang berkaitan dengan perubahan ini? Berkaitan dengan masalah 'jender', beberapa temuan yang patut dicatat antara lain:

- i. Para pekerja tingkat terbawah pada industri otomotif dan konstruksi didominasi oleh tenaga kerja pria, dan sebaliknya 70 - 80% pekerja industri sepatu dan tekstil didominasi oleh tenaga kerja perempuan; mereka dipilih bukan karena laki-laki tidak tertarik bekerja pada industri dengan upah rendah ini, tetapi lebih kepada kenyataan bahwa pekerja perempuan lebih teliti, rapi, dan tidak mudah berontak
- ii. sebagian eks pekerja perempuan justru merasa terbebas dari tekanan keharusan untuk bekerja; para pekerja ini umumnya menilai diri sendiri bahwa mereka bukanlah pencari nafkah utama dan lebih menikmati dapat mendampingi anaknya tumbuh; dan

that women (including wives, mothers and mothers-in-law) are playing a very significant role in enabling families to cope with the crisis.

Social Safety Nets? The primary "social safety net" for workers who have lost their jobs has not been the agricultural or informal sectors or the government's official Social Safety Net (JPS) programs but rather the informal JPS of their own family and network of friends. Parents or parents-in-law have been the ones to respond to the plight of those who have lost their jobs by providing emergency shelter and assistance.

Assistance from external agencies? Workers in the SMERU study area claim to be unaware of the presence of any activity by local NGOs to assist them during the crisis. Workers who have lost their jobs have also found support from local government officials to be almost negligible. Nevertheless, a number of respondents admitted that they had received some assistance from certain government SSN programs.

Hopes and plans for the future? Most respondents said that they hoped eventually to find a similar job to the one they had lost. Some wanted to begin some small business activities such as handicrafts or making food products or else to expand the small business that they are now involved in. Many women, however, claimed that they would prefer to stay at home to run the household and look after their children.

Danger signals: The SMERU appraisal team in its study of these four industries found a number of danger signals that warrant urgent attention:

- i. we estimate that the capacity of many of the workers or the families of workers who have lost their jobs to cope with the present prolonged crisis is limited, especially since many have already exhausted their assets or meagre savings
- ii. many of those affected are still quite young and need to find new employment opportunities as soon as possible, yet there is very little sign of the creation of new opportunities for productive work
- iii. most of the jobs that retrenched workers have entered are of a marginal nature in the sense that earnings are inadequate by comparison with the wages that they were receiving in industry
- iv. there has been a reported increase in crime in some areas - especially in the theft of timber - and in gambling
- v. many retrenched workers are in arrears with payments such as house and land tax, and children's school expenses many families now owe money to the local warung
- vi. the increase in competition among job-seekers in both urban and rural areas has led to a sharing out of both work and earnings

- iii. walaupun demikian, terdapat indikasi para istri yang suaminya terkena dampak krisis dan pulang ke desa (umumnya para pekerja sektor konstruksi) telah dengan sukarela mengambil alih peran suami untuk mencari nafkah utama dengan merantau ke kota mencari pekerjaan, atau bahkan menjadi TKI. Tidak dapat dipungkiri peran perempuan (termasuk istri, ibu dan mertua perempuan) sangat besar dalam mengatasi krisis.

'Jaring pengaman sosial (JPS)'? 'Jaring pengaman sosial (JPS)' utama bagi para pekerja bukan dari sektor pertanian, sektor informal, atau program JPS resmi dari pemerintah, tetapi justru bantuan dari keluarga dan jaringan kerja atau teman-teman. Orang tua atau mertua memahami situasi yang dihadapi anaknya dan selalu memberikan berbagai bantuan yang diperlukan.

Bantuan dari lembaga setempat? Di area pengamatan SMERU, para pekerja mengatakan tidak mengetahui adanya peran dari LSM setempat untuk ikut membantu mereka selama krisis. Demikian juga peran aparat lokal yang dirasakan hampir tidak ada. Meskipun demikian, beberapa pekerja menyatakan telah menerima bantuan program JPS.

Harapan dan rencana masa depan? Mengenai rencana masa depan, sebagian besar pekerja menyatakan ingin memperoleh pekerjaan yang sejenis dengan pekerjaan sebelumnya. Sebagian pekerja ingin menekuni usaha produktif seperti kerajinan tas, produksi makanan, atau ingin mengembangkan usaha yang telah dilakukan sekarang. Meskipun demikian, banyak diantara pekerja perempuan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga serta anak-anak mereka.

Tanda bahaya: Berdasarkan pengamatan Tim SMERU pada empat industri ini, terdapat beberapa hal serius yang perlu diwaspadai antara lain:

- i. diperkirakan daya tahan para pekerja atau keluarga pekerja yang kehilangan pekerjaannya memiliki batasan waktu dalam menghadapi krisis yang berkepanjangan ini, apalagi beberapa telah kehabisan aset dan tabungan
- ii. banyak pengangguran akibat dampak yang masih berusia muda dan memerlukan peluang kerja baru secepatnya; namun hanya sedikit sekali penciptaan lapangan kerja produktif
- iii. pekerjaan yang dimasuki para pekerja bersifat marjinal, dalam arti penghasilan yang diperoleh kurang memadai dibanding sebelumnya
- iv. dilaporkan terjadi peningkatan kriminalitas di beberapa tempat - seperti pencurian kayu - dan maraknya perjudian
- v. banyaknya tunggakan eks pekerja yang tidak terbayar, seperti pembayaran PBB, biaya

among workers (shared poverty), as well as a sharper struggle to obtain any work that is available

- vii. very little attention has been given to the question of overcoming unemployment by local government, informal leaders, NGOs or workers' unions; and
- viii. there has been a substantial flow-on negative impact in areas around industrial sites where many people have traditionally supplied services to factory and construction workers.

■ SMERU Team

- vi. sekolah anak, pinjaman di warung meningkatnya kompetisi di antara para pencari kerja, baik di perkotaan maupun perdesaan yang menyebabkan pembagian kerja dan pembagian penghasilan di antara pekerja, serta upaya lebih keras untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia
- vii. kecilnya perhatian berbagai pihak dalam mengatasi masalah pengangguran oleh pemerintah daerah, pemimpin informal, LSM maupun serikat pekerja, dan
- viii. adanya dampak lanjutan yang nyata terhadap wilayah sekitar industri, antara lain berupa menurunnya atau hilangnya pendapatan banyak pelaku ekonomi yang biasanya menyediakan kebutuhan para pekerja industri dan konstruksi. ■ Tim SMERU

Hasil Survei Dampak Sosial di Jalur Purwakarta - Cirebon

A Social Impact Survey in the Purwakarta - Cirebon Corridor

Joan Hardjono

[Dosen, Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran Bandung]
[Senior Lecturer, Arts Faculty Padjadjaran University, Bandung]

This survey investigated the social impact of the monetary crisis (krismon) on households along the northern coastal plain of West Java and in particular looked at:

- occupational changes and mobility
- the current economic position of households and the effects of the krismon
- participation in Social Safety Net programs.

Scope

The study involved a repeat survey of 455 households that were interviewed in 1997 prior to the beginning of the krismon in the context of a major highway project. A structured interview was conducted with a household member (in most cases the husband or wife). Of the 1999 respondents, 58.2 per cent were women, compared with 58.9 per cent in 1997. The 1997 survey was carried out in the month of June, which in that year was very dry, while data collection for the present study was undertaken in April and May 1999 near the end of a prolonged wet season.

Location

The survey area consisted of 22 hamlets located within a corridor of land stretching from Purwakarta to the outskirts of Cirebon and passing through four administrative districts (kabupaten). The hamlets are of three general types:

- peri-urban hamlets (26.6 per cent of households), located in largely built-up areas on the peripheries of the towns of Purwakarta, Subang, Jatiwangi and Cirebon, with most respondents employed in the informal sector
- semi-rural hamlets (48.8 per cent of households), located more than 10 km from an urban center, with agriculture an important source of livelihood but extensive employment in trade, local small-scale industry and the Jakarta construction industry
- completely rural hamlets (24.6 per cent of households), where the greater majority of respondents work in the agricultural sector

Survei ini meneliti dampak sosial krisis moneter (krismon) terhadap rumahtangga di wilayah sepanjang dataran pantai utara Jawa Barat dan secara khusus mengamati:

- perubahan mata pencaharian dan mobilitas
- keadaan ekonomi rumahtangga saat ini serta efek yang ditimbulkan oleh krismon
- keikutsertaan pada program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Ruang lingkup

Studi ini mencakup survei ulang terhadap 455 keluarga yang telah diwawancarai pada tahun 1997 sebelum terjadinya krisis moneter, dalam konteks pembangunan proyek jalan tol. Wawancara terstruktur dilakukan pada salah seorang anggota keluarga (kebanyakan kepada para suami atau istri). Dari responden tahun 1999, 58.2% adalah perempuan, dibandingkan 58.9% pada tahun 1997. Survei tahun 1997 dilaksanakan pada musim kemarau bulan Juli, sedangkan pengumpulan data untuk studi ini dilakukan pada bulan April dan Mei 1999, saat musim hujan panjang hampir berakhir.

Lokasi

Area survei mencakup 22 kampung yang terletak di jalur wilayah yang terentang antara Purwakarta hingga ke bagian luar Cirebon, yang melalui 4 wilayah kabupaten. Kampung tersebut memiliki 3 ciri utama:

- Kampung di pinggir perkotaan (26.6% dari rumahtangga yang diwawancarai), terletak di daerah yang baru terbentuk di pinggir kota Purwakarta, Subang, Jatiwangi dan Cirebon, di mana responden umumnya bekerja pada sektor informal
- Kampung semi-perdesaan (48.8% dari rumahtangga yang diwawancarai) terletak lebih dari 10 km dari pusat perkotaan, di mana pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama, namun terdapat sejumlah besar pekerjaan di bidang perdagangan, industri kecil setempat dan industri konstruksi yang berpusat di Jakarta
- Kampung yang sepenuhnya perdesaan (24.6

and a small number in handicrafts and trade.

Findings

Occupational changes and mobility

In 43 per cent of the survey households at least one person has changed the type or location of his or her occupation since 1997. Most have been husbands and unmarried sons and daughters of working age rather than wives. Some of these changes can be traced to seasonality but most are explained by the effects of the krismon. While there has been a certain amount of return to and movement from villages, occupational changes have mainly involved employment within the vicinity of the village.

While there has been no change in the number of husbands employed in agriculture, an increase has occurred in the number of other household members (mostly adult sons) working in this sector. There are, however, indications that although more persons are employed, each individual has fewer days' work per month. At the same time fewer women are now engaged in agriculture.

There has been a considerable decline in employment in the construction industry. However, while in the majority of respondents engaged in this sector were idle for several months during 1998, it appears that building and repair work in the housing sub-sector in Jakarta has been increasing since March 1999. Construction work in local areas remains limited but the production of building materials like bricks, lime, and sand is continuing, while the small-scale roof-tile industry is doing well.

Almost no change has occurred in the proportion of husbands employed in trade but fewer wives and other household members now work in this sector. Those who sell basic foodstuffs and cooked food like noodles are still in business but earnings have fallen considerably because of limited local purchasing power and increased competition from sellers from other villages. Most have remained in the same sector for want of a better alternative, but persons trading in less essential items like cloth, garments and kitchen utensils have been so severely affected that many have moved into other occupations.

An increase has occurred in the number of respondents engaged in home industry but returns to labor have tended to decline. Even so, one or two activities like the production of emping crisps and cheap paper toys are doing well because demand for the product is still strong in urban areas. Small business that retread car tires, recharge batteries, repair motor-cycle tires and recycle scrap metal, plastic and old timber are doing particularly well. In any situation where a second-hand article can be offered more cheaply than a new one, small businesses continue to survive. By contrast, village furniture makers and cake producers have been

% dari rumahtangga) di mana kebanyakan responden bekerja di sektor pertanian, dan hanya sejumlah kecil saja yang bekerja di bidang kerajinan tangan dan perdagangan.

Temuan

Perubahan pekerjaan dan mobilitas

Sejak tahun 1997, sebanyak 43% dari rumahtangga yang masuk dalam survei, setidaknya terdapat seorang dari anggota keluarga yang beralih pekerjaan, baik jenis ataupun tempatnya. Hal ini kebanyakan terjadi pada para suami, anak laki-laki, dan anak perempuan usia kerja daripada para istri. Sebagian kecil dari perubahan ini disebabkan oleh sifat pekerjaan musiman, akan tetapi sebagian besar disebabkan oleh pengaruh krismon. Kendati telah terjadi kepulangan dan perpindahan keluar desa, perubahan pekerjaan terutama terjadi di wilayah yang tidak jauh dari desa itu sendiri.

Jumlah kepala keluarga (suami) yang bekerja di bidang pertanian tidak mengalami perubahan, namun jumlah anggota keluarga yang juga ikut bekerja di sektor ini meningkat (terutama anak laki-laki dewasa). Meskipun demikian, terdapat indikasi bahwa walaupun jumlah tenaga kerja meningkat, jumlah hari kerja setiap orang per bulannya semakin kecil. Pada saat yang sama jumlah pekerja perempuan di sektor pertanian semakin sedikit.

Terjadi penurunan cukup tajam pada jumlah tenaga kerja di bidang industri konstruksi (bangunan). Walaupun responden yang biasa bekerja di bidang ini telah menganggur selama beberapa bulan di tahun 1998, kelihatannya pekerjaan bangunan dan perbaikan di sub-sektor perumahan di Jakarta mulai mengalami peningkatan sejak Maret 1999. Pekerjaan konstruksi di wilayah setempat masih terbatas jumlahnya, akan tetapi produksi material bangunan seperti batu bata, kapur bangunan, dan penggalian pasir tetap berjalan, begitu juga industri kecil pembuatan genteng tetap lancar.

Hampir tidak terjadi penurunan jumlah kepala keluarga yang bekerja di bidang perdagangan, sebaliknya, jumlah istri dan anggota keluarga lain yang bekerja di bidang ini berkurang. Yang menjadi pedagang sembako dan makanan siap saji, seperti misalnya bakmi tetap dapat menjalankan usahanya, namun pendapatannya menurun drastis karena terbatasnya daya beli masyarakat dan terjadinya persaingan yang semakin tajam antara pedagang-pedagang dari desa lain. Kebanyakan dari mereka ini tetap bertahan di sektor yang sama karena tidak adanya alternatif lain. Sebaliknya pedagang yang berdagang barang-barang di luar kebutuhan pokok, seperti misalnya pedagang tekstil, pakaian jadi dan barang keperluan dapur/alat rumahtangga telah mengalami pukulan cukup berat yang memaksa mereka beralih bidang pekerjaan.

greatly affected by the drop in local purchasing power.

The percentage of respondents employed in local factories, which are generally of the traditional rather than the modern type, has risen but much of the increase can be traced to the greater employment of teenage girls in the rattan furniture industry, which has expanded because of export opportunities. In the transport sector there has been an increase of 55 per cent in the number of respondents working as pedicab (becak) drivers. At the same time the number who drives motor-cycles with passengers (ojeg) in semi-urban areas has fallen.

Of the 131 husbands who have changed type or place of employment, 46 per cent once worked in Jakarta, in most cases in the construction industry, though a few were petty traders and street vendors. Half of these men have now returned to Jakarta. On the whole they found it hard to get work in their home villages. Some from land-owning families have obtained work in agriculture but this has meant displacement of regular laborers, in particular elderly men. Others have obtained occasional building work locally, as well as sand-digging, factory work and becak driving.

Mobility in employment has also involved the movement of unmarried household members from the village. The number of women (mainly unmarried or divorced) employed in domestic work overseas has more than doubled, which reflects the extent to which the economic position of many households has deteriorated.

Current economic position and effects of the monetary crisis

Most households first felt the impact of the krismon in the sudden rise in prices, especially of rice and other basic foodstuffs. This was followed by the loss of jobs for some and a contraction in sources of livelihood for others. Many respondents have had to move to an occupation that gives lower returns to labor, though in some instances the change has meant greater regularity in income.

The economic position of most respondents has deteriorated greatly since June 1997, when rice was Rp. 900,- per kilogram by comparison with Rp. 2,300,- in April-May 1999. The average monthly per capita income of the poorest 20 per cent of households (1,764 persons) is now Rp. 23,200,- while those in the top 20 per cent receive Rp. 160,000,- (comparable data are not available for 1997).

For 31 per cent of households, the impact of the krismon has been felt most keenly in the greater competition for work, especially agricultural wage labor, trade and becak driving. For another 14.5 per cent the main effect has been the steep rise in the cost of farm inputs like fertilizer, which greatly exceeds the increase in the floor price for rice, while a similar percentage have found that demand for their

Peningkatan terjadi pada jumlah responden yang bekerja di industri rumahtangga akan tetapi hasil usahanya cenderung menurun. Walaupun demikian, satu atau dua kegiatan seperti halnya pembuatan emping dan mainan anak-anak dari kertas cukup lancar karena permintaan akan barang tersebut di daerah perkotaan masih cukup tinggi. Industri-industri kecil di bidang vulkanisasi ban mobil, pengisian baterai (accu), tambal ban, pendauran ulang besi bekas, plastik dan kayu bekas juga tetap berjalan baik. Penjualan barang bekas yang ditawarkan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan barang baru menyebabkan usaha kecil tetap bisa bertahan. Sebaliknya, industri pembuatan mebel desa dan pembuatan jajanan terkena dampak berat karena jatuhnya daya beli di tempat itu.

Terjadi peningkatan persentase responden yang bekerja di pabrik-pabrik setempat yang umumnya berupa pabrik tradisional bukan jenis pabrik modern, akan tetapi peningkatan ini lebih disebabkan karena industri mebel rotan kemudian mempekerjakan gadis-gadis belasan tahun, karena pabrik tersebut harus memekarkan diri karena meningkatnya permintaan pasar ekspor. Di sektor transportasi terjadi peningkatan sebesar 55% dari responden yang menjadi penarik becak. Sebaliknya jumlah penarik ojeg di wilayah semi-perkotaan berkurang.

Terdapat 46% dari 131 suami yang telah beralih pekerjaan, baik jenis ataupun tempatnya setidaknya pernah bekerja di Jakarta, kebanyakan di industri konstruksi, walaupun ada juga yang sebelumnya menjadi pedagang keliling dan pedagang kaki lima. Separuh dari jumlah ini sekarang telah kembali lagi ke Jakarta. Secara keseluruhan mereka berpendapat bahwa sukar bagi mereka untuk mencari pekerjaan di kampungnya sendiri. Beberapa dari mereka yang berasal dari keluarga yang memiliki tanah telah kembali untuk menggarap sendiri lahannya, namun ini juga berarti pengurangan terhadap tenaga buruh tani yang telah ada, yang biasanya terdiri dari orang yang sudah tidak muda lagi. Yang lainnya bekerja sebagai pekerjaan borongan bangunan di tempat itu, yang lain lagi di penambangan pasir, buruh pabrik dan penarik becak.

Mobilitas dalam pekerjaan juga melibatkan perpindahan anggota keluarga yang belum menikah keluar dari desa. Jumlah TKW (umumnya wanita yang telah menikah atau janda) keluar negeri meningkat lebih dari dua kali lipat, ini memberi gambaran betapa parahnya keadaan ekonomi dari keluarga-keluarga ini.

Keadaan ekonomi saat ini dan pengaruh yang ditimbulkan oleh krismon

Kebanyakan rumahtangga merasakan krismon karena kenaikan harga yang secara tiba-tiba, terutama beras dan bahan sembako lainnya. Kemudian diikuti oleh hilangnya pekerjaan bagi sebagian orang dan sebagian lainnya dengan mengecilnya sumber penghasilan. Banyak responden

product or service has decreased. The major consequence for 10 per cent has been the constraints imposed on household industry and small business activity by increases in the prices of raw materials and spare parts.

During the past two years most respondents have sold personal possessions, usually in the form of women's earrings and necklaces, as well as household goods like TV sets, bicycles and furniture. The most frequent reasons for sale were to buy food and to pay children's educational expenses, while a few have disposed of assets like motor-cycles to obtain capital for small business. The majority now has very little left that they could sell in the event of another major economic crisis.

Participation in Social Safety Net (SSN) programs

It was found that SSN participation tends to decline with distance from village and sub-district administrative centers. Respondents in hamlets in the more remote part of villages that are themselves located in the boundary between two sub-districts have participated in none of the SSN programs.

The PDM-DKE padat karya program for infrastructure activities has been the least successful of the programs. Selection of participants has not been directed towards either lower income groups or the unemployed. Respondents normally engaged in agriculture have taken part more commonly than those with other occupations.

The PDM-DKE village credit program for economic activities has been successful in focusing on less well-off households. While insistence on credit-worthiness has placed it beyond the reach of many of the poorest households, there is evidence that it has helped recipients to get small-scale income-generating activities re-established.

The provision of free medical assistance through the Health Card (Kartu Sehat) program has been limited to the elderly poor rather than to all households that are poor. In particular, it has done nothing to give very poor women of child-bearing age access to cheaper Family Planning services than those available at Community Health Centers.

The school Scholarship program was found to be the most impressive of the SSN programs because it displays a positive bias towards poorer households and at the same time has given very tangible assistance to a relatively large number of beneficiaries.

The Operasi Pasar Khusus cheap-rice program has greatly helped the poor in hamlets where 10 kg was provided for three or four consecutive months. There have, however, been wide variations in amount and frequency of distribution, with 40 per cent of respondents never receiving any rice at all. In many areas the amount given to each household was quite

terpaksa harus beralih pekerjaan dengan penghasilan yang lebih rendah, walaupun pada beberapa kejadian peralihan ini telah memberinya penghasilan yang sifatnya lebih tetap.

Sejak Juni 1997 keadaan ekonomi sebagian besar responden telah menurun tajam, di mana pada saat itu harga beras adalah Rp. 900,- sedangkan di bulan April - Mei 1999 adalah Rp. 2,300,- Pendapatan per kapita bulanan dari kelompok 20% rumahtangga termiskin (terdiri atas 1,764 orang) saat ini adalah Rp. 23,200,- sedangkan kelompok 20% terkaya memperoleh Rp. 160,000,- (data pembandingan untuk tahun 1997 tidak ada).

Bagi 31% dari jumlah rumahtangga, dampak krismon tersebut dirasakan dengan meningkatnya persaingan dalam pekerjaan, terutama pada upah buruh pertanian, perdagangan dan penarik becak. Dampak ini dirasakan oleh 14.5% lainnya melalui peningkatan yang tajam dari harga sarana produksi pertanian, seperti misalnya pupuk, yang jauh melampaui harga dasar gabah, sementara jumlah responden yang sama telah merasakan berkurangnya permintaan akan produk atau jasa mereka. Konsekuensi yang dirasakan oleh 10% dari rumahtangga adalah masalah pada industri rumahtangga dan usaha kecil karena meningkatnya harga-harga bahan baku dan suku cadang.

Selama kurun waktu dua tahun terakhir sebagian besar responden telah menjual barang-barang miliknya, terutama yang berupa anting-anting dan kalung wanita, termasuk barang-barang rumahtangga seperti TV, sepeda dan perabotan rumah (mebel). Alasan yang paling sering dikemukakan adalah untuk membeli bahan pangan dan membayar biaya pendidikan anak, sementara penjualan aset seperti sepeda motor adalah untuk mendapatkan modal untuk bisnis. Kebanyakan dari mereka hanya memiliki sedikit barang tertinggal yang dijual sekiranya terjadi lagi krisis ekonomi.

Keikutsertaan pada program Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Ditemukan kenyataan bahwa semakin jauh suatu lokasi dari pusat pemerintahan desa dan kecamatan, maka keikutsertaan dalam program JPS cenderung menurun. Responden yang tinggal di kampung terpencil dan berada di wilayah perbatasan antara dua kecamatan ternyata sama sekali tidak mengikuti satupun dari program JPS yang ada.

Program PDM-DKE untuk kegiatan fisik merupakan program yang paling kurang berhasil dari seluruh program yang ada. Pemilihan peserta tidak ditujukan untuk mencari kelompok berpenghasilan rendah atau kelompok pengangguran. Responden yang bekerja di bidang pertanian lebih sering menjadi peserta dibandingkan responden yang berasal dari bidang pekerjaan lain.

Program kredit perdesaan PDM-DKE untuk kegiatan

small because no distinction was made between very poor and less-needy households.

Households are still going through the process of adjustment to lower real incomes. The economic position of the average family would improve considerably if the open-market price of rice could be brought down to that of the Operasi Pasar Khusus rice (Rp. 1,000,- per kg). If, however, the price goes up beyond the current price in the coming dry season, as many respondents fear, living standards for the majority of the survey households will deteriorate even further. ■

ekonomi cukup berhasil dalam memusatkan perhatian pada keluarga miskin. Karena persyaratan yang sukar dijangkau keluarga termiskin, maka terdapat indikasi bahwa program ini telah menolong peminjamnya untuk membangun kembali usaha kecil yang memberinya penghasilan.

Pemberian bantuan pengobatan cuma-cuma melalui program Kartu Sehat dibatasi hanya untuk lansia yang tidak mampu, daripada untuk seluruh keluarga yang tidak mampu. Secara khusus, program ini tidak mencakup ibu-ibu muda miskin usia subur untuk mendapatkan layanan KB yang lebih murah di luar program yang telah ada di Puskesmas.

Program beasiswa adalah yang paling menarik dari semua program JPS karena menunjukkan adanya penyimpangan (bias) positif ke arah keluarga yang lebih miskin, dan pada saat yang sama juga memberikan bantuan yang sangat terasa kepada sejumlah besar penerima bantuan.

Beras murah dari Operasi Pasar Khusus sangat menolong masyarakat desa, di mana 10 kg beras didistribusikan selama 3-4 bulan secara terus menerus. Terdapat berbagai variasi dalam jumlah dan frekuensi pendistribusian, namun yang jelas 40% dari responden tidak pernah menerima beras apapun. Di banyak tempat jumlah yang diberikan terlalu sedikit, ini disebabkan karena tidak adanya perbedaan antara keluarga paling miskin dengan keluarga agak kurang mampu.

Keluarga-keluarga tersebut masih dalam proses penyesuaian terhadap pendapatan riil yang lebih rendah. Keadaan ekonomi rata-rata rumahtangga akan meningkat secara nyata jika harga beras di pasaran bebas dapat ditekan ke tingkat harga Operasi Pasar Khusus (Rp. 1,000,- per kilo). Jika pada musim kemarau yang akan datang ini harga naik lagi di atas harga yang telah ada sekarang, mereka takut taraf hidupnya akan merosot jauh lebih buruk lagi. ■

Penyesuaian di Pasar Tenaga Kerja Sebagai Respon Terhadap Krisis Labor Market Adjustments as a Response to the Crisis

During the early stages of the Indonesian economic crisis, it was forecast - mainly using simple GDP/employment elasticity models - that the crisis would have a devastating impact on the labor market, particularly on the rate of unemployment. The evidence from the August 1998 Central Agency for Statistics-Labor Force Survey (Sakernas) data, however, reveals that such predictions have not materialized. Between August 1997 and August 1998 the unemployment rate only increased slightly, from 4.7 percent to 5.5 percent. What has occurred instead is that a large adjustment has taken place in wage rates during the same period (Aug-1997 and Aug-1998), as real wages have fallen by around 34 percent. This suggests that the serious decline in labor demand due to the crisis has been absorbed by a sufficiently large reduction in real wages, so that the unemployment rate did not escalate. In fact, total employment has actually increased during the crisis from 85 million to 87.7 million.

In addition to these adjustments in employment and wage rates, other labor market adjustments, which may also have contributed to preventing the unemployment rate from escalating, have also occurred. This note briefly discusses some of these other factors. **Firstly**, there has been a shift in employment from the formal to the informal sector¹. Table 1 shows the employment share of the informal sector in 1997 and 1998, revealing that informal sector employment share increased from 62.8 percent in 1997 to 65.4 percent in 1998. When gender is taken into account, the increase was larger for male workers, but in both years the proportion of female workers operating in the informal sector has been significantly higher than male workers. Comparing urban and rural areas, the increase in the employment share of the informal sector was larger in urban areas, although throughout the whole period the proportion of workers in rural areas in the informal sector has been much higher than in urban areas.

Pada awal krisis di Indonesia, dengan hanya menggunakan model elastisitas GDP/pekerjaan secara sederhana, diperkirakan krisis akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap pasar tenaga kerja, khususnya tingkat pengangguran. Meskipun demikian, kenyataan dari data Sakernas (Survey Tenaga Kerja Nasional) dari Badan Pusat Statistik bulan Agustus tahun 1998 menunjukkan perkiraan tersebut tidaklah benar. Antara bulan Agustus 1997 dan Agustus 1998, tingkat pengangguran hanya meningkat sedikit, dari 4.7% menjadi 5.5%. Walaupun demikian terjadi penyesuaian yang nyata pada tingkat upah selama periode yang sama (Agustus 1997-Agustus 1998), dimana upah riil turun sekitar 34 persen. Hal ini menggambarkan bahwa penurunan yang serius pada permintaan tenaga kerja karena krisis telah diserap oleh penurunan yang cukup besar pada tingkat upah, sehingga tingkat pengangguran tidaklah meningkat tajam. Pada kenyataannya, jumlah orang yang bekerja secara keseluruhan telah meningkat dari 85.4 juta menjadi 87.7 juta.

Selain penyesuaian dalam jumlah orang yang bekerja dan tingkat upah, juga terjadi penyesuaian lain di pasar tenaga kerja lain, yang mungkin juga telah memberi sumbangan dalam menjaga agar tingkat pengangguran tidak meningkat tajam. Catatan singkat ini akan mendiskusikan beberapa faktor lain dimaksud. **Pertama**, terjadi pergeseran pekerjaan dari sektor formal ke sektor informal¹. Tabel 1 memperlihatkan pangsa sektor informal dalam kesempatan kerja menunjukkan peningkatan dari 62.8 persen pada tahun 1997 menjadi 65.4 persen pada tahun 1998. Jika aspek gender diikutsertakan, peningkatan pada pria lebih besar dari perempuan, tetapi pada kedua tahun yang sama - proporsi pekerja perempuan yang berada di sektor informal lebih tinggi dari pekerja pria. Apabila dilihat menurut daerah perkotaan dan perdesaan, peningkatan sektor informal dalam kesempatan kerja, lebih tinggi di wilayah perkotaan, tetapi pada kedua tahun itu proporsi pekerja di sektor informal di wilayah perdesaan jauh lebih tinggi.

Tabel 1
Pangsa Pekerjaan di Sektor Informal (%)
Employment Share of the Informal Sector (%)

	1997	1998
Total	62.8	65.4
Pria/Male	58.3	61.6
Perempuan/Female	70.2	71.5
Perkotaan/Urban	42.8	45.7
Perdesaan/Rural	73.3	75.8

Sumber/Source: Sakernas 1998

Secondly, there has been a shift in sectoral employment back to agriculture. Table 2 shows the employment share of the agriculture and manufacturing sectors in 1997 and 1998. It reveals that the proportion of those working in the agriculture sector increased substantially, from 40.8 percent in 1997 to 45 percent in 1998. On the other hand, the share of manufacturing sector employment shrank from 12.9 percent to 11.3 percent during the same period. This shifting pattern of sectoral employment is true for both male and female workers as well as in urban and rural areas.

Thirdly, it is apparent that there has been a downward adjustment in the number of hours that people are working. Table 3 shows the proportions of those who worked more than 35 hours per week and those who worked less than 15 hours per week in both 1997 and 1998. Those who worked more than 35 hours per week declined from 64.2 percent in 1997 to 60.9 percent in 1998, while those who worked less than 15 hours per week increased from 9.6 percent to 10.5 percent during the same period. This adjustment in working hours holds equally for both male and female workers as well as in both urban and rural areas. Falling real wages may induce workers to compensate by working longer hours. This, however, is constrained by falling labor demand. Declining economic activities and less work opportunities, therefore, have resulted in the observed reduction in working hours.

Kedua, terdapat pergeseran dalam kesempatan kerja antar sektor. Tabel 2 menunjukkan pangsa pekerjaan pada sektor pertanian dan manufaktur tahun 1997 dan 1998. Tabel tersebut menunjukkan bahwa proporsi orang yang bekerja di sektor pertanian meningkat nyata, dari 40.8% pada tahun 1997 menjadi 45% pada tahun 1998. Sebaliknya, pangsa pekerjaan dari sektor manufaktur menyusut dari 12.9% menjadi 11.3% selama periode yang sama. Pola pergeseran dari pekerjaan sektoral ini terjadi baik pada pekerja perempuan maupun pria, juga baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Ketiga, terdapat penyesuaian dalam bentuk penurunan jumlah jam kerja. Tabel 3 memperlihatkan proporsi orang yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu dan yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu pada tahun 1997 dan 1998. Orang yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu menurun dari 64.2% pada tahun 1997 menjadi 60.9% pada tahun 1998, sementara itu orang yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu meningkat dari 9.6% menjadi 10.5% dalam kurun waktu yang sama. Penyesuaian jam kerja yang sama ini ditemukan baik pada pekerja perempuan maupun pekerja pria, juga di wilayah perkotaan dan perdesaan. Penurunan tingkat upah mungkin mendorong pekerja untuk bekerja dengan jam kerja yang lebih panjang. Namun hal ini terhambat oleh menurunnya permintaan tenaga kerja. Menurunnya kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja menghasilkan pengurangan jam kerja.

Tabel 2
Pangsa Pekerjaan di Sektor Pertanian dan Manufaktur (%)
Employment Share of the Agriculture and Manufacturing Sectors (%)

	Pertanian/Agriculture		Manufaktur/Manufacturing	
	1997	1998	1997	1998
Total	40.8	45.0	12.9	11.3
Pria/Male	40.3	44.3	11.5	10.2
Perempuan/Female	41.8	46.0	15.2	13.2
Perkotaan/Urban	7.9	11.1	17.3	15.7
Perdesaan/Rural	57.9	62.9	10.6	9.0

Sumber/Source: Sakernas 1998

Tabel 3
Proporsi Pekerja Berdasarkan Jam Kerja (%)
Proportion of Workers by Hours of Work (%)

	> 35 jam/minggu (hour/week)		< 15 jam/minggu (hour/week)	
	1997	1998	1997	1998
Total	64.2	60.9	9.6	10.5
Pria/Male	73.5	70.4	5.7	6.3
Perempuan/Female	49	45.6	16	17.1
Perkotaan/Urban	79.1	75.9	5.7	6.4
Perdesaan/Rural	56.4	53	11.6	12.7

Sumber/Source: Sakernas 1998

The various labor market adjustments that have occurred in response to the crisis clearly show the advantage of maintaining a flexible labor market. Without this flexibility, the catastrophic labor market scenario, which was widely predicted during the early period of the crisis, might have materialized. This does not mean that these adjustments have been a painless process. Accepting lower wages, moving from one job to another, or working fewer hours are inevitably unpleasant experiences. In addition, reduced real wages may also have spill-over effects on poor and vulnerable groups as remittances decline. The alternative to a flexible labor market, however, is that a shock such as this crisis may have resulted in abruptly disappearing employment opportunities altogether and higher rates of open unemployment. The policy implications resulting from these findings are that data on employment and unemployment alone are not appropriate indicators for the targeting of employment creation programs. In addition, employment creation programs need to be directed to those areas with depressed labor demand, if any such areas exist. ■ AS, SSm

Beragam penyesuaian di pasar tenaga kerja yang terjadi sebagai jawaban terhadap krisis secara jelas menunjukkan perlunya mempertahankan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Tanpa fleksibilitas ini, skenario bencana pasar tenaga kerja yang telah diprediksikan secara luas pada awal krisis dapat saja terjadi. Hal ini bukan berarti bahwa penyesuaian-penyesuaian yang terjadi merupakan proses yang tidak menyakitkan. Penurunan upah, berpindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain, atau bekerja dengan waktu yang lebih pendek, bukanlah merupakan pengalaman yang menyenangkan. Sebagai tambahan, pengurangan tingkat upah mungkin juga telah memberi pengaruh lanjutan pada kelompok miskin dan kelompok rentan sebagai akibat penurunan kiriman uang. Akan tetapi alternatif dari pasar tenaga kerja yang fleksibel adalah tekanan krisis dapat menyebabkan hilangnya banyak kesempatan kerja dan tingginya tingkat pengangguran terbuka secara tiba-tiba. Implikasi kebijakan yang dapat diambil dari hasil temuan ini adalah bahwa data orang yang bekerja dan menganggur bukanlah indikator yang sesuai untuk menentukan target program penciptaan lapangan kerja. Sebagai tambahan, program penciptaan lapangan kerja perlu ditujukan pada wilayah yang mengalami penurunan tajam dalam permintaan tenaga kerja, jika daerah seperti itu memang ada. ■ AS, SSm

¹ Informal sektor dalam hal ini didefinisikan sebagai orang yang bekerja sendiri tanpa ada yang mempekerjakannya, bekerja sendiri dengan keluarga atau pekerja paruh waktu, dan pekerja keluarga.

¹ Informal sector is defined as consisting of those who are self-employed without any employees, self-employed with family or part-time workers, and family workers.

Kisah Seorang Mandor Bangunan Gedung Tinggi yang Diterpa Krisis

A Story of a High-Rise Construction Foreman Hit by the Crisis

To provide a more tangible picture for our readers of the impact of the crisis on the lives of workers, we are featuring two accounts here that describe the personal experiences of individuals - one who remains in serious difficulty and another who is now working once more. These accounts are just two isolated examples, yet SMERU is convinced that the problems that these individuals face – and those of many others like them – will command our attention. We plan to feature a number of other personal stories drawn from our field researchers interviews in the next edition.

When the SMERU team was brought by a former construction worker to meet his old foreman in the village of Mandirancan, Kabupaten Banyumas, the foreman's house was empty. According to his neighbours, the foreman was in Jakarta trying to convince his wife to return home. At that moment she was at the labor exchange office trying to obtain work in Malaysia with the Indonesian Labor Force scheme. It was only at our third attempt that SMERU was finally able to locate the foreman at his parent's house not far from where he himself lived.

Depressed and clearly frustrated, the foreman told his family and his neighbors about his failure to bring his wife home. According to his neighbor, the wife was just trying to help her husband support the family after her husband had been unemployed for more than a year. She remained determined to find work overseas leaving behind her three small children. The youngest was not yet three; the two others in class 3 and 5 at primary school. The foreman had been told that he needed no less than Rp. 2.5 million to cover the costs of his wife's training and registration with the TKI scheme if she was to withdraw at this point.

When he was asked about his present circumstances, he didn't say much and seemed withdrawn. But when asked about his work as a foreman on high-rise construction sites in Jakarta since 1985, he replied with evident enthusiasm. He didn't want to be called a foreman, although during his time in Jakarta he had trained scores, perhaps hundreds, of young construction workers. He was modest and didn't want to admit that he had given opportunities and training to other young men eager to earn an income in Jakarta. His own experiences as a foreman on high-rise buildings in Jakarta included the Puspitek building in Serpong, the Pluit Apartments at Pasar Ikan, the Bank Exim building, the Bank Bumi Daya center,

Pada edisi ini kami ingin menampilkan kisah tentang kondisi kehidupan pekerja yang terkena krisis - satu yang terparah dan satu yang telah bekerja kembali - untuk memberikan gambaran yang lebih nyata kepada kita semua. Cerita ini hanya merupakan kasus, namun SMERU yakin bahwa masalah yang mereka hadapi - dan juga banyak yang seperti mereka - perlu mendapatkan perhatian kita. Kami juga berencana untuk menampilkan beberapa kisah nyata lain pada edisi mendatang.

Ketika Tim SMERU diantar oleh seorang eks tukang besi untuk menemui bekas mandornya di desa Mandirancan, Kabupaten Banyumas, rumah mandor itu kosong. Menurut tetangganya, sang mandor sedang menemui istrinya ke Jakarta dan ingin mengajaknya pulang. Saat itu istrinya sedang berada di penampungan tenaga kerja, berharap dapat bekerja sebagai TKI di luar negeri, rencananya Malaysia. Setelah gagal untuk kedua kalinya, barulah SMERU dapat menemui sang mandor di rumah orang tuanya, tidak jauh dari lokasi rumahnya.

Kemudian dengan wajah lesu dan nampak frustrasi, sang mandor bercerita kepada keluarga dan tetangganya tentang kegagalan upayanya untuk memboyong kembali istrinya ke rumah. Si istri tetap bertekad mendapatkan pekerjaan di luar negeri dengan meninggalkan ketiga orang anaknya yang masih kecil untuk sekedar bertahan hidup, karena suaminya sudah lebih dari 1 tahun menganggur. Menurut tetangga sang mandor, sang istri ingin membantu suaminya dan memperoleh penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Anak terkecil belum lagi genap 3 tahun. Dua anak lainnya sedang bersekolah di kelas 3 dan 5 SD. Ia mendapat informasi, biaya yang harus dikeluarkan untuk menebus istrinya tidak kurang dari 2.5 juta rupiah.

Ketika ditanyakan keadaannya, ia tidak dapat bercerita banyak - dan tampak tertutup. Namun ketika ia ditanya tentang pekerjaannya sebagai mandor di bangunan gedung tinggi di Jakarta yang telah ditekuninya selama belasan tahun sejak tahun 1985 - ia menjawab dengan sangat antusias. Ia tidak mau disebut mandor, walaupun selama di Jakarta ia telah menghasilkan puluhan bahkan ratusan tukang besi cor. Iapun rendah diri, tidak mau mengakui bahwa ia yang telah memberi jalan dan memberi pelatihan bagi para pemuda untuk menjadi tukang besi cor dan

Hotel Shangri-la, Citraland, the Soekarno-Hatta Airport terminal, the Pasar Rebo Hospital, and other locations stretching outside Jakarta to Purbalingga, Brebes and elsewhere. When the crisis struck he was working on a site in the Sudirman Central Business District behind the Police Headquarters not far from the Jakarta Stock Exchange building.

He lost his job there, as did hundreds of others - including some of those he had helped. Nowadays he is doing any kind of work that he can manage to find, sometimes hoeing or carrying wood a couple of times a week for about Rp. 6,000,- a day. He explained that it is not easy to obtain work in the ricefields, on house construction or as a carpenter, for these require connections. In this village the family system is still used to build a house and only those of proven capability can find work as agricultural laborers.

His wife's debts in the local warung were mounting. This was confirmed by the owner of the warung near his house. While working in Jakarta he had obtained a plot of land with a dwelling for his wife and children along with furniture and electronic goods. But when the crisis struck, the work that had occupied him was insufficient to provide him with sufficient capital to start an enterprise of his own. At present, he does not even own any sawah. Despite his difficulties, he is still hoping to find the kind of work he had in the past. Even though his income was not large, it was always enough to provide for his family, and to help his brothers and sisters and his parents.

SMERU is sure that there are many workers who have had similar experiences to this foreman during the past two years. They can only hope that the present situation will soon improve. ■ SKR

memperoleh penghasilan di Jakarta. Tidak terkatakan pengalaman yang dimilikinya - sebagai mandor besi cor membangun gedung-gedung tinggi di Jakarta mulai dari gedung Puspitek di Serpong, Apartemen di Pluit - Ps. Ikan, gedung pusat Bank Exim, Bank Bumi Daya, Hotel Shangri-la, Citraland, Landasan Bandara Soekarno-Hatta, Rumah sakit di Ps. Rebo, hingga malang melintang ke luar Jakarta seperti di Purbalingga, Brebes, dan lain-lain. Ketika krisis menerpa ia sedang mengerjakan gedung-gedung di area SCBD di belakang Komdak tidak jauh dari gedung BEJ.

Bersamanya, turut terimbas puluhan bahkan ratusan tukang yang turut membangun gedung itu, termasuk beberapa tukang yang telah dibinanya. Kini ia hanya bekerja serabutan sebagai buruh dan hanya mengharapkan pekerjaan dari orang, kadang-kadang mencangkul atau membawa kayu yang baru ada 2 minggu sekali, bahkan kadang sebulan hanya untuk tiga hari kerja dengan upah Rp. 6,000,- per hari. Ia bercerita bahwa untuk mendapatkan pekerjaan di sawah, membangun rumah tinggal, atau tukang kayu tidaklah mudah - perlu koneksi. Di desa itu, sistem keluarga masih berlaku untuk membangun rumah dan hanya mereka yang diketahui mampu bekerja di sawah yang akan diajak menjadi buruh tani.

Hutang istrinya di warung pun menumpuk. Ini dibenarkan oleh pemilik warung dekat dengan rumahnya. Selama bekerja di Jakarta ia dapat menyediakan sepetak tanah dan bangunan untuk anak-istrinya tinggal, juga berbagai perabotan dan peralatan elektronik. Namun pekerjaan yang ditekuninya itu tidak cukup untuk memberikan modal ketika krisis menerpa untuk membangun usaha. Saat ini, lahan sawah pun ia tidak punya. Walaupun demikian ia tetap berharap dapat memperoleh pekerjaan yang serupa dengan sebelumnya, walau penghasilannya tidak besar - asalkan cukup untuk sekedar menghidupi keluarga dan membantu saudara serta orangtuanya.

SMERU yakin banyak mandor dan tukang yang mengalami hal serupa dengan apa yang terjadi pada sang mandor selama dua tahun terakhir ini. Mereka hanya dapat berharap semoga keadaan segera membaik. ■ SKR

FOCUS ON

Seorang Korban PHK yang Sekarang Menjadi Room Boy di Sebuah Hotel

A Retrenched Worker Who is Now a Hotel Room Boy

Pak A, a Junior Technical School graduate, had been working in a shoe factory for the past 8 years with a basic salary of Rp. 160,000,-. With frequent overtime he was usually able to earn around Rp. 300,000,- to 350,000,- per month. His severance pay of Rp. 2.8 million, plus a payment of Rp. 700,000,- from the Labor Insurance scheme, was used to build a house on land owned by his parents in the village of Margajaya, near Bogor.

Not long after his retrenchment, he managed to find work as a room boy in a Jakarta hotel with a monthly salary of Rp. 90,000,-. Although the salary is small, he often receives tips from the hotel guests, so he is able to take home as much as Rp. 400,000,- a month. With an income as large as that and work that is much easier compared with his previous factory employment, in fact Pak A is feeling happier now that he has been retrenched. ■ BS, Hst

Pak A, seorang tamatan STM yang telah bekerja di suatu pabrik sepatu selama 8 tahun dengan gaji pokok terakhir sebesar Rp. 160,000,-. Apabila rajin lembur, ia dapat memperoleh tambahan sekitar Rp. 300,000,- hingga 350,000,- per bulan. Pesangonnya yang sebesar Rp. 2.8 juta ditambah uang Astek Rp. 700,000,- telah digunakan untuk membangun rumah di tanah milik orang tuanya di Desa Margajaya-Bogor.

Tidak lama setelah di-PHK ia memperoleh pekerjaan kembali sebagai room boy di sebuah hotel di Jakarta dengan gaji Rp. 90,000,-/bulan. Meskipun gajinya kecil, namun karena sering mendapat tip dari para tamu, ia bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp. 400,000,-/bulan. Dengan biaya perjalanan sekitar Rp. 40,000,-/bulan, ia masih bisa membawa pulang uang sebesar Rp. 360,000,- setiap bulan. Dengan penghasilan sebesar itu dan jenis pekerjaan yang relatif lebih ringan dibanding pekerjaan sebelumnya, ia bahkan merasa lebih senang setelah terkena PHK. ■ BS, Hst